

**ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
IDENTIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TENGAH (2008-2012)**

**Bachtiar Kustyawan**

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sebelas Maret

**ABSTRACT**

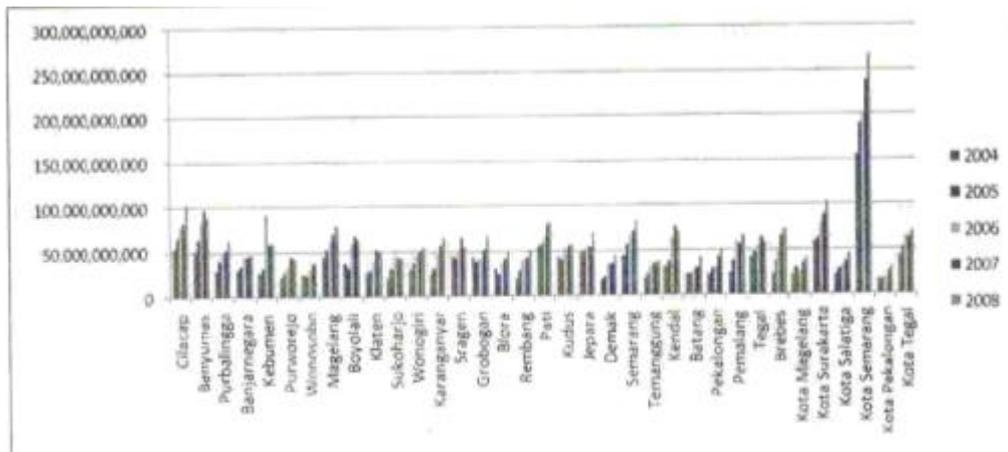
*This research was aimed to examine and find out the performance difference between district own source revenue and the financial capability of regencies/ cities in Central Java. Based on some literatures, District Own Source Revenue is one of indicators that can be used as a measure to determine the capability of regencies/ cities in facing regional autonomy. This research used secondary data from the years 2008-2012 which were gotten from BPS and Directorate General of Fiscal Balance. This research used descriptive and quantitative method using index financial capability and using t test independent test. The test results show that there is a difference between the average performance of PAD regencies and the average performance of PAD cities in Central Java. PAD growth, PAD contribution to the budget and PAD growth elasticity to GDP cities is relatively higher than the regencies. PAD growth of the cities is higher than PAD growth of the regencies in Central Java. PAD contribution to APBD city is bigger than PAD contribution to APBD regencies in Central Java. PAD growth elasticity to GDP growth of the city is more elastic than the elasticity of revenue to GDP growth in Central Java. The average cities have an average fiscal capacity index which is higher than the regencies in Central Java. The average fiscal capacity index of cities is higher than the regencies in Central Java. The Regency Government has a wider area than the city, so it needs to manage the local asset well and maximally to push revenue growth in the regencies. Local asset management should be based on regional characteristics. The improvement infrastructure is needed to support the local asset management.*

**Keywords:** *Regencies/Cities in Central Java, District Own Source Revenue. Map of District Financial Capability*

**1. Pendahuluan**

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diberlakukan mulai tahun 2001 sampai sekarang diharapkan dapat menjadikan pemerintahan semakin lebih baik. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini, pembangunan nasional mulai mengedepankan pembangunan yang berorientasikan pada wilayah dengan daerah sebagai pusat pertumbuhannya. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu upaya strategis penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan tersebut, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Pemerintah daerah dapat menggali potensi dana yang ada di daerahnya sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pengelolaan PAD merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pemerintah Daerah. Keuangan daerah menjadi tumpuan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada era otonomi daerah. Salah satu indikator untuk membiayai hal tersebut bersumber dari PAD. Semakin tinggi PAD, dapat diharapkan bahwa kemampuan keuangan daerah itu meningkat, dan sebaliknya jika PAD rendah, maka kemampuan keuangan daerah juga tidak mengalami peningkatan (Sumardi & Prasetyani, 2011).



**Grafik 1. Perkembangan PAD Kabupaten/Kota di Kota Jawa Tengah 2004-2008**

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali), dalam Jurnal (Tamtomo, 2010)

Pada tahun 2004 - 2008 Kota Semarang merupakan kota yang mempunyai PAD paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Kota lain seperti Kota Surakarta dan Kota Tegal juga mempunyai PAD yang cukup tinggi. Rata-rata perolehan PAD di kota relatif lebih tinggi daripada rata-rata perolehan PAD di kabupaten. Kabupaten dan kota merupakan daerah yang mempunyai tingkat pemerintahan yang sama, akan tetapi mempunyai beberapa perbedaan dalam beberapa aspek, seperti dari aspek luas wilayah, aspek kependudukan, aspek mata pencaharian penduduk, aspek struktur pemerintahan, dan aspek perekonomian. Luas wilayah pemerintahan Kabupaten relatif lebih luas daripada pemerintahan Kota, sehingga dalam menjangkau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten diperlukan anggaran yang besar. Tingkat kepadatan penduduk di kabupaten lebih rendah daripada kota. Kepadatan penduduk juga menjadi suatu masalah bagi pemerintah jika tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten relatif lebih sulit dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan fasilitas bagi masyarakat.

Rata-rata jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten lebih rendah daripada jumlah PDRB Kota. Dari aspek perekonomian, rata-rata PDRB di kabupaten lebih rendah daripada PDRB kota (Halim, Abdul, 2002, dalam (Abdullah, 2011)). Hal ini berimplikasi pada proporsi PAD yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Aktivitas ekonomi dan pendapatan di kota juga lebih besar daripada kabupaten (Prud'homme, 1995, dalam (Abdullah, 2011)). Perlu adanya penelitian dan kajian secara mendalam mengenai kemampuan daerah terutama yang ditinjau dari aspek

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diidentifikasi dengan metode kuadran dan klasifikasi daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah, (1) Apakah ada perbedaan antara rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten dengan pertumbuhan PAD kota di Jawa Tengah? (2) Apakah ada perbedaan antara rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten dengan rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD kota di Jawa Tengah? (3) Apakah ada perbedaan antara elastisitas PAD terhadap PDRB kabupaten dengan elastisitas PAD terhadap PDRB kota di Jawa Tengah?, dan (4) Bagairnana perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah?.

## 2. Kajian Literatur

(Adi, 2012) telah membahas tentang Kernarnpuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonorni dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan data penelitian di provinsi Se-Jawa Bali pada tahun 1998 - 2004. Terjadi perbedaan yang signifikan antara IKK (Indeks Kernarnpuan Keuangan) sebelum era otonomi daerah dan setelah era otonomi daerah. IKK (Indeks Kernarnpuan Keuangan) setelah otonomi ternyata lebih baik dari dibandingkan sebelum otonomi daerah. Secara umum daerah rnengalarni peningkatan perturnbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, sayangnya pertumbuhan ini tidak diikuti dengan peran peningkatan peran (*share*) terhadap belanja. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

(Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007) juga rnelakukan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. Dilihat dari sisi perturnbuhan penerimaan dan pengeluaran anggaran, Kabupaten Mandaling Natal, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharat secara rata - rata mengalami pertumbuban pengeluaran yang lebih besar dari pertumbuhan penerimaan. Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai. dan Kota Padang Sidimpuan rnengalami pertumbuhan penerimaan yang lebih besar dari pengeluarannya. Kabupaten/Kota pemekaran di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan (*growth*) yang positif, tetapi untuk peranan PAD (*share*) relatif rnasih kecil peranannya dalam struktur APBD. Kesimpulan terakhir dalam jurnal ini adalah dari Peta kemampuan keuangan (metode kuadran), mengindikasikan ketidaksiapan masing - masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dan rnasih kurangnya kemandirian dalam berotonomi.

Sumarsono, Hadi (2009) dengan penelitian yang berjudul Analisis Kemandirian Otonomi Daerah : Kasus Kota Malang ( 1999 - 2004) menunjukkan bahwa untuk daerah kota Malang memiliki efisiensi publik cukup tinggi, dimana antara produktivitas masyarakat relatif besar dibandingkan dengan pembelanjaan publik. Kinerja pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Malang menunjukkan elastisitas PAD terhadap PDRB sebesar 5,5 -2,2 persen. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Pernda Kota Malang tergolong inelastis, artinya kenaikan PDRB kurang berpengaruh terhadap kenaikan PAD. Berdasarkan analisis, tren elastisitas PAD adalah negatif sedangkan tren perturnbuhan PAD adalah positif.

I Dew a Gede Bisma dan Hery Susanto dengan penelitian yang berjudul Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007 juga membahas tentang kinerja keuangan daerah. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003- 2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi

daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang. Efektifitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak elisien. Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum sumbangan PAD (share) terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTB TA 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Provinsi NTB berada pada skala indeks 0,54. Menurut kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah angka indeks tersebut termasuk dalam kriteria kemampuan keuangan Tinggi.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan perhitungan kinerja PAD. Lokasi yang diambil sebagai penelitian adalah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kabupaten sebanyak 29 kabupaten dan jumlah kota sebanyak 6 kota. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data PAD, APBD, dan PDRB kabupaten kota di Jawa Tengah pada tahun 2008 - 2012. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Berikut adalah analisis yang digunakan dalam penelitian ini :

#### a. Perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran *Share*, *Growth*, dan *Elastisitas*

$$\begin{aligned} \text{Share PAD} &: \frac{PAD}{APBD} \times 100\% \\ \text{Growth PAD} &: \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\% \\ \text{Elastisitas} &: \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{\text{Pertumbuhan PAD}} \times 100\% \\ \text{Pertumbuhan PDRB} &: \frac{APBD \text{ Pertumbuhan PDRB}}{PDRB_t - PDRB_{t-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan :

PAD<sub>t</sub> : PAD tahun t  
 PAD<sub>t-1</sub> : PAD tahun t-1  
 PDRB<sub>t</sub> : PDRB tahun t  
 PDRB<sub>t-1</sub> : PDRB tahun t-1

#### b. Uji Beda Dua Rata – rata

##### 1) Uji homogenitas

Uji Homogenitas Variansi dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variable X dan Y bersifat homogen atau tidak. Pengujian ini dapat dilakukan dengan *software* olah data seperti SPSS atau pun dengan rumus manual yaitu dengan uji F.

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

Penghitungan menggunakan Uji F (Rahardjo, 2012):

Hipotesis :

F hitung  $\geq$  F tabel maka Ho ditolak (varian beda)

F hitung  $<$  F tabel maka Ho gagal ditolak (varian sama)

Dimana :

S1 : Standar deviasi variabel yang mempunyai varian lebih besar

S2 : Standar deviasi variabel yang mempunyai varian lebih kecil

2) Uji *T-test Independent*

Menurut (Rahardjo, 2012) Uji T-tcst independen atau uji beda dua mean independen adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perbedaan rata - rata antara dua kelompok bebas / tidak berpasangan.

Hipotesa dalam Uji t independen adalah :

Ho diterima jika T hitung < T Tabel yang berarti  $X_1 = X_2$

Ho ditolak jika T hitung > T tabel yang berarti  $X_1 \neq X_2$

Penghitungan untuk varian yang sama digunakan rumus (Rahardjo, 2012):

$$t = \frac{X_1 - X_2}{Sp \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$$Sp = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Df =  $n_1 + n_2 - 2$

Penghitungan untuk varian yang berbeda :

Keterangan

$X_1$  atau  $X_2$  : rata-rata sampel kelompok 1 atau 2

$n_1$  atau  $n_2$  : jumlah sarnpel kelompok 1 atau 2

$S_1$  atau  $S_2$  : standard deviasi sampel kelompok I atau 2

Df : degree of freedom (derajat kebebasan)

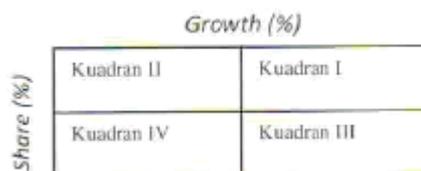
Sp : varian populasi

$$t = \frac{X_1 - X_2}{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

$$Df = \frac{\left[\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right]}{\left[\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{(n_1 - 1)}\right] + \left[\frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{(n_2 - 1)}\right]}$$

3) Metode Kuadran

Metode kuadran adalah metode yang digunakan untuk mengetahui dan mengelompokkan suatu daerah /wilayah kedalam kriteria kondisi keuangan daerahnya. Metode ini menggunakan pertumbuhan PAD (*Growth*) dan kontribusi PAD terhadap APBD (*Share*) sebagai indikator kemampuan keuangan daerah dengan rata - rata provinsi sebagai titik tengah acuannya.



Sumber : Deddy (2004) dalam Sumardi dan Dwi Prasetyani (2011)

Keterangan :

Kuadran I = Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai share dan growth yang tinggi.

Kuadran II = Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peluang besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah, namun pertumbuhan PAD tinggi.

Kuadran III = Kondisi yang ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD mempunyai peluang yang mengecil, hal ini karena pertumbuhan PAD-nya kecil. Disini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.

Kuadran IV = Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD dan pertumbuhan PAD juga rendah.

#### 4) Analisis Trend

Analisis *trend* merupakan model *trend* umum untuk data time series dan untuk meramalkan.

Persamaan yang digunakan dalam model *trend* adalah :

$$Y = a + bX$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan rumus berikut :

$$A = \frac{\sum Y}{n} \text{ dan } b = \frac{\sum XY}{\sum X}$$

Keterangan :

Y : Variabel *trend*

X: Variabel waktu (tahun)

a : Besarnya Y saat X = 0

b : Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan.

#### 5) Metode Indeks Kemampuan Keuangan

Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari tiga indeks, yaitu Indeks pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas (*elasticity*), dan indeks kontribusi (*share*).

$$Indeks = \frac{Nilai X_{hasil\ pengukuran} - Nilai X_{kondisi\ Maksimum}}{Nilai X_{Kondisi\ Maksimum} - Nilai X_{Kondisi\ minimum}}$$

Hasil indeks yang telah dihitung dan di rata – rata, kemudian digunakan untuk mencari indeks kemampuan keuangan (IKK). Rumus penghitungan IKK (Sumardi dan Dwi Prasetyani, 2011, 85) :

$$IKK = \frac{X_G X_E X_S}{3}$$

Keterangan

IKK : Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

X<sub>G</sub> : Indeks Pertumbuhan PAD (*Growth*)

$X_E$  : Indeks Elastisitas Pertumbuhan PAD terhadap PDRB (*elasticity*)

$X_S$  : Indeks kontribusi PAD terhadap APBD (*Share*)

**4. Analisis Data Dan Pembahasan**

**a. Uji Homogenitas**

**1) Rata - rata Pertumbuhan PAD**

Variansi rata - rata pertumbuhan PAD dengan menggunakan uji homogenitas adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Uji Homogenitas Rata – rata Pertumbuhan PAD Kabupaten / Kota di Jawa TENGAH Tahun 2008-2012

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.407	1	33	.528

Sumber : Hasil Analisis.

*Levene Statistic* menunjukkan F hitung 0,407 dengan signifikansi 0,528. F hitung  $0,407 < F$  tabel 4,139, ini menunjukkan bahwa kedua variansi data bersifat *homogen* atau sarna.

**2) Rata - rata Kontribusi PAD terhadap APBD**

Variansi rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD dengan menggunakan uji homogenitas adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Uji Homogenitas Rata – rata Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2012

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
26.835	1	33	.000

Sumber : Hasil Analisis.

*Levene Statistic* menunjukkan F hitung 26,835 dengan signifikansi 0.000. F hitung  $26,835 > F$  tabel 4,139, ini menunjukkan bahwa kedua , variansi data bersifat *heterogen* atau berbeda.

**3) Rata - rata Elastisitas PAD terhadap PDRB**

Variansi rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB dengan menggunakan uji homogenitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Uji Homogenitas Rata - rata Elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2012

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.424	1	33	.519

Sumber : Hasil Analisis.

*Levene Statistic* menunjukkan F hitung 0,424 dengan signifikansi 0,519. F hitung  $0,424 < F$  tabel 4,139, ini menunjukkan bahwa kedua variansi data bersifat *homogen* atau sama.

**4) Rata - rata Indeks Kemampuan Keuangan Daerah**

Variansi rata - rata indeks kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan uji homogenitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Homogenitas Rata – rata Indeks Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.014	1	33	.906

Sumber : Hasil Analisis

*Levene Statistic* menunjukkan F hitung 0,014 dengan signifikansi 0,906. F hitung  $0,014 < F$  tabel 4,139, ini menunjukkan bahwa kedua variansi data bersifat homogen atau sama.

**b. Uji T Independen Test**

Kabupaten di Jawa Tengah	Rata - Rata Pertumbuhan PAD	Kota di Jawa Tengah	Rata - Rata Pertumbuhan PAD
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Cilacap	14.93%	Kota Magelang	17.90%
Kab. Banyumas	14.25%	Kota Surakarta	17.41%
Kab. Purbalingga	8.48%	Kota Salatiga	12.33%
Kab. Banjarnegara	15.62%	Kota Semarang	22.34%
Kab. Kebumen	12.00%	Kota Pekalongan	27.08%
Kab. Purworejo	14.92%	Kota Tegal	18.13%
Kab. Wonosobo	11.95%		
Kab. Magelang	10.01%		
Kab. Boyolali	15.77%		
Kab. Klaten	11.77%		
Kab. Sukoharjo	28.30%		
Kab. Wonogiri	14.00%		
Kab. Karanganyar	13.48%		
Kab. Sragen	15.06%		
Kab. Grobogan	6.50%		
Kab. Blora	10.98%		
Kab. Rembang	15.43%		
Kab. Pati	16.15%		
Kab. Kudus	17.15%		
Kab. Jepara	13.79%		
Kab. Demak	15.20%		
Kab. Semarang	14.31%		
Kab. Temanggung	16.66%		
Kab. Kendal	11.88%		
Kab. Batang	15.73%		
Kab. Pekalongan	18.48%		
Kab. Pemasang	8.53%		
Kab. Tegal	17.71%		
Kab. Brebes	7.45%		
<b>Rata - Rata Pertumbuhan PAD Kabupaten</b>	<b>14,02%</b>	<b>Rata - Rata Pertumbuhan PAD Kota</b>	<b>19,20%</b>

Pertumbuhan PAD Berikut adalah tabel rata - rata pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah :

Tablet 5 Rata - rata Pertumbuhan PAD

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Sumber: BPS dan DJPK RI, data diolah.

Rata - rata pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun 2008 - 2012 tertinggi adalah Kabupaten Sukoharjo. Rata - rata pertumbuhan PAD di Kabupaten Sukoharjo mencapai 28,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo dapat menggali potensi PAD dari tahun ke tahun lebih baik dari kabupaten/kota di Jawa Tengah lainnya sehingga Kabupaten Sukoharjo mempunyai rata - rata pertumbuhan PAD yang lebih tinggi dan kabupaten/kota lainnya. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan PAD kota relatif mempunyai angka yang lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten.

Tabel 6 Uji T Independen Test Rata - rata Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Tahun 2008 - 2012

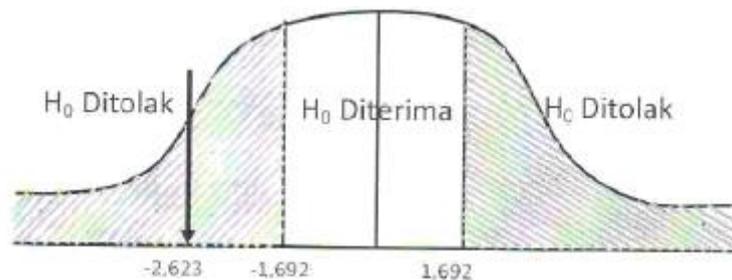
Kabupaten kota		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Growth_PAD	1	29	.1400	.04088	.00759
	2	6	.1900	.05060	.02066

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Growth_PAD	Equal variances assumed	.407	.528	-2.623	33	.013	-.05000	.01906	-.08878	-.01122
	Equal variances not assumed			-2.272	6.421	.061	-.05000	.02201	-.10300	.00300

Sumber : Hasil Analisis

Gambar 1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H<sub>0</sub>



Sumber : Hasil Analisis.

Hasil dari uji F menunjukkan bahwa kedua variansi data homogen atau sama, maka hasil yang diambil adalah hasil pada *equal variances assumed*. Hasil t hitung -2.623 dan berada pada daerah penolakan h<sub>0</sub> dengan tingkat probabilitas  $0,013 < 0,05$ ; maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara rata - rata pertumbuhan PAD kabupaten di Jawa Tengah dengan rata - rata pertumbuhan PAD kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - rata pertumbuhan PAD kabupaten dan rata - rata pertumbuhan PAD kota adalah 5 persen.

### 5) Kontribusi PAD terhadap APBD

Berikut adalah tabel kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten/kota di Jawa Tengah :

Tabel 7 Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 1 tahun 2008 - 2012

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Rata - Rata PAD	Rata - rata APBD	Kontribusi PAD terhadap APBD
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Cilacap	148.654.893.200	1.425.976.640.925,12	10,42%
Kab. Banyumas	153.590.095.200	1.332.613.202.108,49	11,53%
Kab. Purbalingga	81.318.583.400	857.740.872.293,40	9,48%
Kab. Banjarnegara	66.563.095.198	888.504.515.747,40	7,49%
Kab. Kebumen	71.214.386.400	1.087.035.124.777,00	6,55%
Kab. Purworejo	70.737.559.275	857.642.048.168,40	8,25%
Kab. Wonosobo	59.140.193.691	799.767.308.957,20	7,39%
Kab. Magelang	88.733.093.800	1.017.896.243.884,80	8,72%
Kab. Boyolali	89.691.665.200	980.770.066.389,20	9,15%
Kab. Klaten	61.660.954.941	1.179.847.637.556,20	5,23%
Kab. Sukoharjo	83.426.247.800	890.250.748.689,40	9,37%
Kab. Wonogiri	70.673.944.000	1.036.758.345.919,60	6,82%
Kab. Karanganyar	86.348.070.000	937.712.506.586,40	9,21%
Kab. Sragen	88.016.936.600	977.738.117.247,98	9,00%
Kab. Grobogan	76.239.925.400	1.017.584.565.744,40	7,49%
Kab. Blora	58.946.302.827	875.389.131.404,80	6,73%
Kab. Rembang	69.036.464.400	751.978.690.962,45	9,18%
Kab. Pati	116.362.142.600	1.104.880.207.073,53	10,53%
Kab. Kudus	89.564.500.600	934.315.548.840,74	9,59%
Kab. Jepara	91.969.826.200	986.242.303.614,80	9,33%
Kab. Demak	63.629.746.400	925.593.260.804,60	6,87%
Kab. Semarang	112.293.361.200	946.061.183.844,80	11,87%
Kab. Temanggung	56.424.791.442	733.138.524.319,40	7,70%
Kab. Kendal	89.635.540.400	940.875.870.045,60	9,53%
Kab. Batang	55.218.671.503	719.102.204.328,80	7,68%
Kab. Pekalongan	74.656.754.000	827.048.413.883,90	9,03%
Kab. Pemasang	80.527.321.783	1.010.521.914.207,00	7,97%
Kab. Tegal	81.171.612.637	1.034.074.103.005,00	7,85%
Kab. Brebes	80.655.989.000	1.175.320.870.327,60	6,86%
Kota Magelang	60.533.921.739	445.685.230.877,00	13,58%
Kota Surakarta	147.582.866.000	921.538.601.161,97	16,01%
Kota Salatiga	57.753.199.792	443.783.250.859,00	13,01%
Kota Semarang	440.912.192.600	1.817.470.880.297,40	24,26%
Kota Pekalongan	51.974.461.262	465.426.400.184,30	11,17%
Kota Tegal	107.127.455.800	494.252.444.365,80	21,67%

Sumber : BPS dan DPJK RI, data diolah.

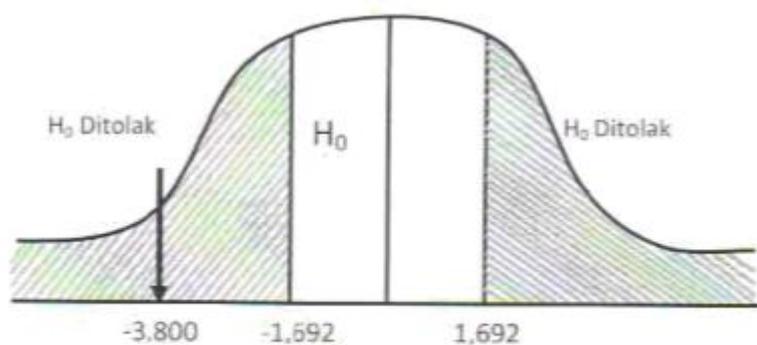
Rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD tertinggi adalah Kota Semarang dengan rata - rata nilai kontribusi PAD sebesar 24,26 persen dan rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD terendah adalah Kabupaten Klaten dengan rata - rata nilai kontribusi PAD sebesar 5,23. Kota relatif lebih unggul dalam kontribusi PAD daripada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kontribusi PAD kota di Jawa Tengah rata - rata mencapai angka diatas 10 persen, sedangkan kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten di Jawa Tengah rata - rata masih dibawah 10 persen.

Tabel 8 Uji T Independen Test Rata - rata Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 -2012

Kabupaten_kota		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Share_PAD	1	29	.0852	.01595	.00296
	2	6	.1667	.05203	.02124

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Share_PAD	Equal variances assumed	26.835	.000	-7.262	33	.000	-.08149	.01122	-.10432	-.05866
	Equal variances not assumed			-3.800	5.196	.012	-.08149	.02144	-.13600	-.02699

Sumber : Hasil Analisis.



Gambar 2 Daerah Penerimaan dan Penolakan  $H_0$

Sumber : Hasil Analisis.

Hasil dari uji F menunjukkan bahwa varian kedua data *heterogen* atau berbeda. Maka hasil yang diambil adalah hasil pada *equal variances not assumed*. Hasil t hitung -3.800 dan berada pada daerah penolakan  $H_0$  dengan tingkat probabilitas  $0,012 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten di Jawa Tengah dengan rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten di Jawa Tengah dan rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD kota di Jawa Tengah adalah 8,14 persen.

### Elastisitas PAD terhadap PDRB

Berikut adalah tabel elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan APBD kabupaten/kota di Jawa Tengah:

Tabel 9 Elastisitas Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Pertumbuhan PAD (%)	Pertumbuhan PDRB (%)	Elastisitas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	14,9	13,3	1,1260035	elastis
Kab. Banyumas	14,2	11,2	1,2702713	elastis
Kab. Purbalingga	8,5	13,2	0,6411692	inelastis
Kab. Banjarnegara	15,6	10,4	1,5015227	elastis
Kab. Kebumen	12,0	10,5	1,1450104	elastis
Kab. Purworejo	14,9	10,2	1,4558748	elastis
Kab. Wonosobo	12,0	9,5	1,2621828	elastis
Kab. Magelang	10,0	10,3	0,9751424	inelastis
Kab. Boyolali	15,8	11,5	1,3662725	elastis
Kab. Klaten	11,8	9,3	1,2684835	elastis
Kab. Sukoharjo	28,3	11,1	2,5442088	elastis
Kab. Wonogiri	14,0	10,9	1,2860212	elastis
Kab. Karanganyar	13,5	10,6	1,2756409	elastis
Kab. Sragen	15,1	13,4	1,1211343	elastis
Kab. Grobogan	6,5	11,6	0,5599339	inelastis
Kab. Blora	11,0	9,9	1,1078884	elastis
Kab. Rembang	15,4	10,0	1,5410942	elastis
Kab. Pati	16,2	10,6	1,5211371	elastis
Kab. Kudus	17,2	7,9	2,1637041	elastis
Kab. Jepara	13,8	10,8	1,2822759	elastis
Kab. Demak	15,2	9,8	1,5501360	elastis
Kab. Semarang	14,3	10,5	1,3611474	elastis
Kab. Temanggung	16,7	10,7	1,5542409	elastis
Kab. Kendal	11,9	11,6	1,0279285	elastis
Kab. Batang	15,7	10,5	1,4979845	elastis
Kab. Pekalongan	18,5	11,1	1,6640099	elastis
Kab. Pemasang	8,5	10,4	0,8188509	inelastis
Kab. Tegal	17,7	11,2	1,5784363	elastis
Kab. Brebes	7,4	12,8	0,5804942	inelastis
Kota Magelang	17,9	11,7	1,5289012	elastis
Kota Surakarta	17,4	11,4	1,5230459	elastis
Kota Salatiga	12,3	9,8	1,2587001	elastis
Kota Semarang	22,3	12,0	1,8586235	elastis
Kota Pekalongan	27,1	9,5	2,8488176	elastis
Kota Tegal	18,1	9,6	1,8946918	elastis

Sumber : BPS dan DPJK RI, data diolah.

Secara umum pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki elastisitas yang bersifat elastis. Beberapa daerah seperti Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pemasang, dan Kabupaten Brebes mempunyai elastisitas yang bersifat inelastis. Artinya perubahan pertumbuhan PAD tidak terlalu mempengaruhi perubahan pertumbuhan PDRB. Hal ini dikarenakan suatu

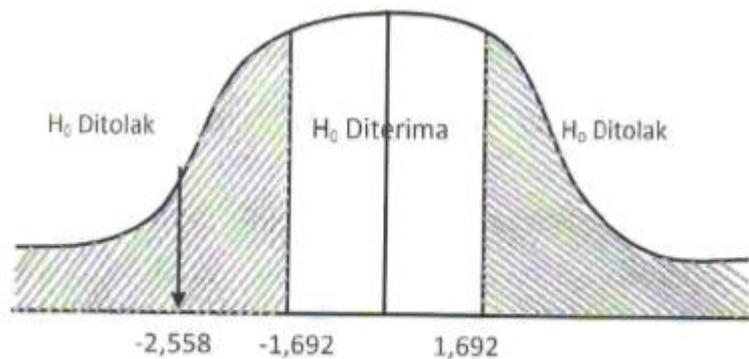
daerah mempunyai pertumbuhan PAD yang rendah, akan tetapi mempunyai pertumbuhan PDRB yang tinggi.

Tabel 10 Uji T Independen Test Rata - Rata Elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

Kabupaten_kota	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Elastisitas 1	29	1.3120	.41767	.07756
2	6	1.8188	.55741	.22756

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Elastisitas_PAD	.424	.519	2.558	33	.015	-.50679	.19810	-.90982	.10376
			2.108	6.214	.078	-.50679	.24041	-1.09018	.07660

Sumber : Hasil Analisis.



Gambar 3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H<sub>0</sub>

Sumber : Hasil Analisis

Hasil dari Uji F menunjukkan bahwa kedua variansi data *homogen* atau sama, maka hasil yang diambil adalah hasil pada *equal variances assumed*. Hasil t hitung -2,558 dan berada pada daerah penolakan  $h_0$  dengan tingkat probabilitas  $0,015 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara rata-rata elastisitas PAD terhadap PDRB kabupaten di Jawa Tcngh dengan rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB kota di Jawa Tengah, Perbedaan antara rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB kabupaten dan rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB kota adalah 0.5 (satuan dalam indeks).

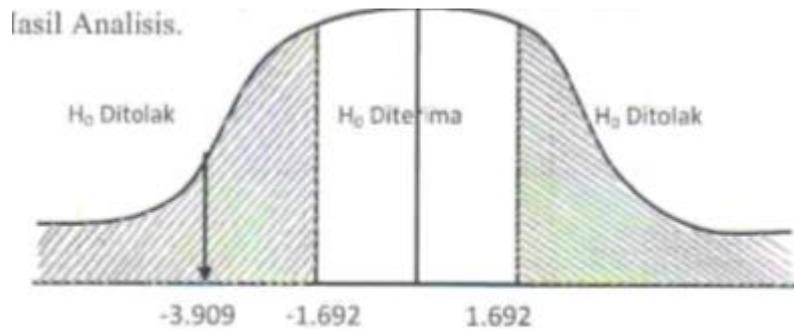
### Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Berikut adalah tabel Uji T Independen Test Rata - rata IKK kabupaten/kota di Jawa Tengah : Tabel 11 Uji T Independen Test Rata-rata IKK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012

	Kabupaten_kota	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
IKK	1	29	.3245	.14342	.02663
	2	6	.5767	.14610	.05965

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
IKK	Equal variances assumed	.014	.906	-3.909	33	.000	-.25218	.06451	-.38342	.12094
	Equal variances not assumed			-3.861	7.142	.006	-.25218	.06532	-.40603	.09834

Sumber: Hasil Analisis



Gambar 4 Daerah Penerimaan dan Penolakan  $H_0$   
 Sumber : Hasil Analisis.

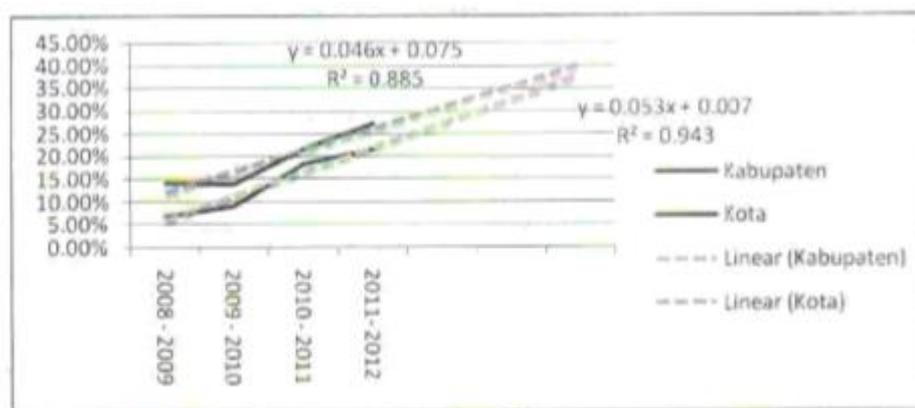
Hasil dari uji F menunjukkan bahwa kedua variansi data *homogen* atau sama, maka hasil yang diambil adalah hasil pada *equal variances assumed*. Hasil t hitung -3,909 dan berada pada daerah penolakan  $H_0$  dengan tingkat probabilitas  $0.000 < 0.05$ . maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara rata - rata indeks kemampuan keuangan kabupaten di Jawa Tengah dengan rata - rata indeks kemampuan keuangan kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - rata indeks kemampuan keuangan kabupaten dan rata - rata indeks kemampuan keuangan kota di Jawa Tengah adalah 0.25 (satuan dalam indeks),

c. **Trend Linier**

**Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

Rata - rata pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya yang disebabkan oleh beberapa faktor. PAD di Kabupaten/Kota beberapa tahun ke depan diharapkan mengalami kenaikan agar suatu daerah tetap dapat mengembangkan perekonomian di daerahnya, Trend PAD beberapa tahun ke depan untuk Rata - Rata PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Gambar 5 Trend Rata - rata PAD Kabupaten-Kota di Jawa Tengah 2008 – 2015



Sumber : Hasil Analisis.

Tabel 12 Trend Rata - rata Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2009 - 2015

Tahun (1)	Rata - Rata Pertumbuhan PAD Kabupaten (2)	Rata - Rata Pertumbuhan PAD Kota (3)
2009	6,91%	14,20%
2010	9,23%	13,83%
2011	18,39%	21,59%
2012	21,55%	27,16%
2013	$0,053 (5) + 0,007 =$ 27,20%	$0,046 (5) + 0,075 =$ 30,50%
2014	$0,053 (6) + 0,007 =$ 32,50%	$0,046 (6) + 0,075 =$ 35,10%
2015	$0,053 (7) + 0,007 =$ 37,18%	$0,046 (7) + 0,075 =$ 39,70%

Sumber : Hasil Analisis.

Garis Linier *trend* rata - rata PAD kabupaten adalah  $y = 0.053x + 0.007$  dengan tingkat  $R^2 = 94.5\%$ . Karena trend positif maka garis trend linier membentuk garis miring ke arah kanan atas yang mencerminkan selama tiga tahun ke depan diperkirakan rata - rata PAD kabupaten akan naik. Gans linier trend rata - rata PAD kota adalah  $y = 0,046x + 0,075$  dengan tingkat  $R^2 = 88,5\%$ . Karena trend positif maka garis linier membentuk garis miring ke arah kanan atas yang mencerminkan selama tiga tahun ke depan diperkirakan rata - rata PAO kota akan naik.

### Peta Kemampuan Keuangan Daerah

#### 1) Metode Kuadran

Metode Kuadran disusun untuk membagi suatu daerah menjadi empat kuadran dengan menggunakan indikator Pertumbuhan (Growth, PAD dan Kontribusi (Share) PAD terhadap PDR. Daerah yang digunakan acuan adalah rata - rata PAD dan rata - rata kontribusi PAD terhadap PDRB provinsi.

Tabel 13 Kernarnpuan Keuangan Daerah Tahun 2012 Berdasarkan Kuadran

<b>KUADRAN II</b>	<b>KUADRAN I</b>
Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Denauk, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes	Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
<b>KUADRAN IV</b>	<b>KUADRAN III</b>
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalanga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang.	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga.

Sumber : Hasil Analisis.

Daerah yang berada di Kuadran I adalah Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal merupakan daerah dengan status kemampuan keuangan yang ideal karena kabupaten-kota ini mempunyai PAD yang

mengambil peran besar dalam APBD dan daerah ini mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Daerah yang berada di Kuadran II adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rcmbarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes. Kabupaten/kota yang berada di kuadran II ini merupakan kabupaten/kota yang kurang ideal. karena kabupaten/kota ini memiliki pertumbuhan PAD yang tinggi akan tetapi kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah.

Daerah yang berada di Kuadran III adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Salatiga, Kabupaten/kota yang berada di kuadran III merupakan kabupaten/kota yang mempunyai pertumbuhan PAD yang rendah, akan tetapi kontribusi PAD terhadap APBD nya tinggi. Daerah yang berada di Kuadran IV adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaren, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Pali, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Ternanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang. Kabupaten/Kota yang berada di Kuadran IV merupakan kabupaten/kota yang mempunyai kondisi keuangan yang buruk, dikarenakan pertumbuhan PAD yang rendah dan kontribusi PAD terhadap APBD juga rendah.

2) Metode Indeks Metode indeks disusun berdasarkan tiga indikator, yaitu indeks pertumbuhan PAD, indeks kontribusi PAD terhadap APBD dan indeks elastisitas PAD terhadap PDRB untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Ketiga indeks tersebut merupakan indikator dari penyusunan peta kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode indeks. Indeks Kemampuan Keuangan (TKK) Daerah yang termasuk dalam status kemampuan keuangan yang tinggi adalah Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan. Keempat daerah ini mempunyai Indeks Kemampuan Keuangan Daerah yang lebih tinggi daripada daerah lainnya.

Sedangkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK.) daerah terendah adalah Kabupaten Purbalingga dengan LKK 0,04

Tabel 14 Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012 Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota	Xg (Indeks Growth)	Xs (Indeks Share)	Xe (Indeks Elasticity)	IKK	Status Kemampuan Keuangan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kota Semarang	0,74	1,00	0,66	0,80	<b>TINGGI</b>
2 Kab. Sukoharjo	1,00	0,32	1,00	0,77	
3 Kota Tegal	0,50	0,73	0,78	0,67	
4 Kota Pekalongan	0,66	0,37	0,73	0,59	
5 Kota Magelang	0,66	0,40	0,57	0,55	<b>SEDANG</b>
6 Kab. Rembang	0,60	0,18	0,77	0,52	
7 Kab. Batang	0,62	0,14	0,67	0,48	
8 Kab. Pekalongan	0,60	0,19	0,61	0,47	
9 Kota Surakarta	0,40	0,52	0,44	0,45	
10 Kab. Magelang	0,55	0,15	0,58	0,43	
11 Kab. Kebumen	0,60	0,06	0,63	0,43	
12 Kab. Demak	0,49	0,12	0,60	0,41	
13 Kota Salatiga	0,41	0,33	0,48	0,40	
14 Kab. Boyolali	0,48	0,18	0,54	0,40	
15 Kab. Banjarnegara	0,48	0,12	0,56	0,39	
16 Kab. Sragen	0,53	0,16	0,43	0,37	
17 Kab. Kendal	0,42	0,19	0,46	0,36	
18 Kab. Tegal	0,47	0,13	0,47	0,35	
19 Kab. Brebes	0,44	0,04	0,56	0,34	
20 Kab. Purworejo	0,39	0,16	0,47	0,34	
21 Kab. Wonogiri	0,43	0,07	0,49	0,33	
22 Kab. Banyumas	0,35	0,31	0,30	0,32	
23 Kab. Jepara	0,34	0,17	0,37	0,29	
24 Kab. Pati	0,28	0,22	0,35	0,28	<b>RENDAH</b>
25 Kab. Temanggung	0,33	0,10	0,37	0,27	
26 Kab. Bora	0,29	0,07	0,40	0,25	
27 Kab. Pemasang	0,31	0,07	0,37	0,25	
28 Kab. Grobogan	0,35	0,09	0,29	0,25	
29 Kab. Wonosobo	0,29	0,09	0,33	0,24	
30 Kab. Kudus	0,20	0,20	0,32	0,24	
31 Kab. Semarang	0,19	0,27	0,16	0,21	
32 Kab. Cilacap	0,10	0,21	0,12	0,15	
33 Kab. Klaten	0,19	0,00	0,21	0,13	
34 Kab. Karanganyar	0,07	0,15	0,07	0,10	
35 Kab. Purbalingga	0,00	0,12	0,00	0,04	

Sumber : BPS dan Ditjen Keuangan RI, data diolah.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

I. Ada perbedaan antara rata - rata pertumbuhan PAD kabupaten dengan rata - rata pertumbuhan PAD kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - rata pertumbuhan PAD kabupaten dan rata - rata pertumbuhan PAD kota di Jawa Tengah adalah 5 persen. Rata - rata pertumbuhan PAD kota lebih besar daripada rata - rata pertumbuhan PAD kabupaten di Jawa Tengah.

2. Ada perbedaan antara rata - rata kontribusi: PAD terhadap APBD kabupaten dengan rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten dengan rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD kota di Jawa Tengah adalah 8.14 persen. Rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD kota lebih besar daripada rata - rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten di Jawa Tengah.

3. Ada perbedaan antara rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB kabupaten dengan rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB kabupaten dengan rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB kota di Jawa Tengah adalah 0.5 dalam satuan indeks). Rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB kota lebih besar daripada rata - rata elastisitas PAD terhadap PDRB kabupaten di Jawa Tengah.

4. Ada perbedaan antara rata - rata indeks kemampuan keuangan kabupaten dengan rata - rata indeks kemampuan keuangan kota di Jawa Tengah. Perbedaan antara rata - rata indeks kemampuan keuangan kabupaten dengan rata - rata indeks kemampuan keuangan kota di Jawa Tengah adalah 0,25 (dalam satuan indeks). Rata - rata indeks kemampuan keuangan daerah kota lebih besar daripada rata - rata indeks kemampuan keuangan daerah kabupaten di Jawa Tengah

### Saran

Saran untuk hasil penelitian ini antara lain:

1. Pertumbuhan PAD merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengelola aset daerah. Wilayah kabupaten yang lebih luas membuat daerah kabupaten perlu pengelolaan PAD yang lebih baik terutama dalam hal penggalan PAD seperti peningkatan dan perluasan objek pajak,

2. Beberapa kabupaten, kota di Jawa Tengah yang masih memiliki kontribusi PAD terhadap APBD yang rendah diharapkan dapat mengelola dan meningkatkan PAD. Pengelolaan harus didasarkan pada karakteristik dan potensi dari masing - masing kabupaten kota

Kabupaten kota di Jawa tengah secara umum mempunyai elastisitas PAD terhadap PDRB. Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan PAD dan mempertahankan kestabilan PDRB, sehingga peningkatan PAD juga diimbangi dengan peningkatan PDRB.

4. Perlunya perbaikan sarana prasarana, terutama sarana prasarana yang mendukung dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten yang mempunyai kemampuan keuangan daerah yang rendah.

### Referensi

Abdullah, S. (2011). *Apakah Perbedaan antara Kabupaten dan Kota?*

Adi, P. H. (2012). Kemampuan Keuangan dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 21(1), 1–19.

Hidayat, P., Pratomo, W. A., & Harjito, D. A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3), 213–222.

Rahardjo, S. (2012). *Uji Beda Mean Dua Sampel*.

Sumardi, & Prasetyani, D. (2011). *Analisis Kinerja dan Potensi Pendapatan Asli Daerah*. Surakarta: Cakra Books.

Tamtomo, E. (2010). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi fiskal Studi Kasus Kab/Kota Jawa Tengah*. Universitas Indonesia.